

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya. 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks)*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Destivano Wibowo & Harjon Sinaga. 2005. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hans Kelsen. 2007. *General Theory of Law and State* (Teori Umum Hukum dan Negara) Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptis-Empiris. Bee Media Indonesia. Jakarta.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- H.U. Adil. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*. Mitra Wicana Media. Jakarta
- Isharyanto. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Deepublish. Yogyakarta.
- Ismail Suny. 1985. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Aksara Baru. Jakarta.
- Jimly Asshidiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____.2015. *Gagasan Konstitusi Sosial (Institusi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani)*. Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). Jakarta.
- _____. 2018. *Konstitusi Keadilan Sosial (Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia)*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

- Khelda Ayunita dan Abd.Rais Asman. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Mitra Wicana Media. Jakarta.
- Muh Hasrul, Fajlurrahman Jurdi, Ahmad Yani. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara (Penguatan Lembaga Negara Dalam Konstitusi)*. Litera. Yogyakarta.
- Mustafa Kamal Roka. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Nadir. 2015. *Hukum Persaingan Usaha Membidik Persaingan Tidak Sehat dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Universitas Brawijaya Press (UB Press). Malang.
- Said Sampara, Laode Husen, Fauziah Basyuni, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print Makassar. Makassar.
- Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana. Jakarta.
- Suyud Margono. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* Cetakan ke-17. Kencana. Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar. 2017. *Lembaga Negara Independen Dinamika perkembangan dan urgensi Penataannya Kembali pasca-Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pres. Depok.

Jurnal

- Ahmad Basarah. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal MMH. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Jilid 43 Nomor 1 Januari 2014.
- Alston Chandra, dan Sari Murti Wisyastuti Y. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat di Sektor Perunggasan". Jurnal Hukum Justitia Et Pax. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017.

- Anna Maria Tri Anggraini. *“Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Kepelabuhan Dalam Perspektif Persaingan Usaha”*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.11 No. 4- Desember 2014.
- Asip Suyudi. *“Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dengan Lembaga Sensor Film mengenai Kepastian Hukum Bidang Perfilman”* Jurnal Hukum Rechtsregel. Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.
- Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda. *“Politik Hukum Kelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Pusat Penelitian Hukum dan Kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia. Volume 2 Nomor 1 Maret Tahun 2013.
- Gunawan A.Tauda. *“Kedudukan Komisi negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”*. Jurnal Pranata Hukum. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Volume 6 Nomor 2 Juli Tahun 2011.
- Hendra Nurtjahjo. *“Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tahun ke-35 No.3 Juli September 2005.
- Laurensius Arliman S. *“Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum”*. Jurnal Kertha Semaya. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 8 Nomor 7 Tahun 2020.
- Luh Gede Mega Karisma, I Gde Putra Ariana. *“Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*. Jurnal Kertha Negara. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 04 Nomor 05 2016.
- Rommy Patra. *“Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*. Jurnal MMH. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jilid 41 Nomor 2 April 2012.
- Yudi Widagdo Harimurti. *“Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara yang Tidak Diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun*

1945". Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Volume 4 Nomor 1 Juni 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2001 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Komisi Nomor 161/Kep/KPPU/XI/2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU/ XIV/ 2016 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UUD NRI 1945.

Artikel

<https://kbbi.web.id/duduk>. Diakses pada 23 Juli 2020 Pukul 14.21 WITA

<https://kbbi.web.id/lembaga>. Diakses pada 28 Agustus 2020 pukul 21:55 WITA.

<https://kbbi.web.id/sekretariat>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 12.25 WITA.

<https://kbbi.web.id/implikasi>. Diakses Pada 29 Juni 2020 Pukul 12.11 WITA

Hamdan Zoelva. Webinar KPPU dengan Tema “Redefinisi Kelembagaan KPPU” Pada tanggal 15 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2020-2024.

Permohonan Pengujian Perkara Nomor 54/PUU/XVIII/2020 atas Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LAMPIRAN



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH VI

(Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat)

Gedung Keuangan Negara II Lt. 6, Jl. Urip Sumoharjo Km.4
Makassar, Sulawesi Selatan

Telepon: (0411)429927, 429957 Faximile : (0411)429958

SURAT KETERANGAN

Nomor **343** /Wil.VI/S/X/2020

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anif Laila Sahir
NIM : B 11116114
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan km 10, Ramsis Unhas Unit 3
Blok E

Yang tersebut diatas telah melakukan kegiatan penelitian dan wawancara di Kantor Wilayah VI KPPU Makassar dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Kedudukan Hukum Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Kantor Wilayah KPPU Makassar".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Makassar, ~~26~~ Oktober 2020

Kepala Kantor Wilayah VI

KPPU Makassar



Hilman Pujana



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245

Telepon (0411) 584002, Fax (0411) 585188.

Laman : www.unhas.ac.id/perpustakaan

SURAT KETERANGAN

Nomor: 19245/UN4.38.1.1/PT.01.04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasyim, S.Sos
NIP : 197012021993031002
Pangkat/Gol : Penata (Gol. III/c)
Jabatan : Kasubag Tata Usaha
Unit Kerja : UPT Perpustakaan Unhas

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANIF LAILA SAHIR
Nomor Pokok : B11116114
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan KM.10 Ramsis Unhas 3 Blok E, Makassar

benar telah melakukan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul:

**“KEDUDUKAN HUKUM SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
DI KANTOR WILAYAH KPPU MAKASSAR”**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 8 September 2020

Kasubag Tata Usaha ,

Hasyim, S.Sos

NIP. 197012021993031002





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN Km. 10 MAKASSAR 90245

Tlp : (0411) 587219, 584000, 584686, Fax : (0411) 587219, 584000, 584686 Email:fhuh@indosat.net.id

KETERANGAN PENELITIAN

No. 534 /RB-FH/IX/2020

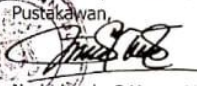
Kepala Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan ini menerangkan Bahwa;

Nama : ANIF LAILA SAHIR
NIM : B11116114
PRODI : S1-LMU HUKUM
Departemen : S1-Hukum Tata Negara
Alamat : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM 10 RAMSIS

Telah melakukan penelitian di Ruang Baca Fakultas Hukum Unhas, sehubungan dengan penyelesaian karya ilmiah yang berjudul:

KEDUDUKAN HUKUM SEKERTARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI KANTOR WILAYAH KPPU MAKASSAR

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 04/September/2020
Pustakawan

Nurhidayah, S.Hum., M.M.
NIP. 196508061990032009

